

## LAPORAN TAHUNAN INFID 2011

### PROMOTING EQUITABLE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA: STRENGTHENING PEOPLE-CENTERED DEVELOPMENT



**INFID, 2012**

## DAFTAR ISI

<b>BAB</b>		<b>HAL</b>
<b>I</b>	<b>Latar Belakang</b>	<b>03</b>
<b>II</b>	<b>Analisa Situasi</b>	<b>04</b>
	2.1 Analisa Situasi Nasional	04
	2.2 Analisa Situasi Internasional	05
	2.3 Analisa Situasi Internal	06
<b>III</b>	<b>Capaian Program INFID</b>	<b>07</b>
<b>IV</b>	<b>Kegiatan yang diselenggarakan</b>	<b>08</b>
	4.1 Melakukan penelitian dan publikasi mengenai Foreign Direct Investment, ekonomi kerakyatan, community resilience untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, pencapaian MDGs selama 10 tahun di Indonesia dan implementasi Deklarasi Paris di Indonesia.	<b>08</b>
	4.2 Advokasi terhadap program penanggulangan kemiskinan – PNPM Mandiri dan pembangunan yang inklusif	12
	4.3 Advokasi melalui development effectiveness dengan kegiatan sebagai berikut	12
	4.4 Advokasi melalui lembaga multilateral seperti ASEAN, G20 dan PBB dengan kegiatan sebagai berikut:	13
	4.5 Capacity Development	14
	4.6 Kegiatan sebagai respond atas situasi nasional dan internasional	15
<b>V</b>	<b>Pembelajaran dan Keberlanjutan</b>	<b>16</b>
	5.1 Pembelajaran	16
	5.2 Keberlanjutan	16
<b>VI</b>	<b>LAMPIRAN</b>	<b>17</b>

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG**

Laporan ini merangkum keluaran, hasil program dan kegiatan INFID selama 2011. Disusun berdasarkan acuan program 2010 – 2012 dan rencana kerja periode Januari - Desember 2011. Laporan berikut merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas INFID terhadap publik. Hasil yang dicapai dalam laporan ini merupakan hasil kerja advokasi bersama yang dilakukan INFID bersama anggota dan jaringan ditingkat nasional dan internasional.

Beberapa kegiatan di luar rencana dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan, seperti untuk merespond situasi sosial, ekonomi dan politik di tingkat nasional dan internasional. Tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka kerja jaringan untuk memelihara solidaritas masyarakat sipil, sekaligus media konsolidasi dalam memperkuat kerja-kerja masyarakat sipil sebagai gerakan sosial di tingkat nasional dan internasional.

Sebagaimana mandat anggota dalam *General Assembly* tahun 2008 dan juga hasil konsultasi di enam regional pada tahun 2009, INFID fokus pada advokasi nasional dan internasional dengan memperkuat agenda pembangunan terutama pada isu kemiskinan dan ketimpangan. Kerangka inilah yang menjadi rujukan dalam pelaporan di tahun 2011.

## BAB II

### ANALISA SITUASI

#### 2.1. Analisa Situasi Nasional

Terlepas dari masalah kemiskinan, ketimpangan, dan komitmen pemerintah terhadap pencapaian MDGs yang menjadi tantangan pembangunan di Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang mewarnai situasi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia selama tahun 2011. Peristiwa tersebut meliputi diluncurkannya Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pengesahaan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan konflik antar warga di era demokrasi. Peristiwa tersebut turut mempengaruhi koordinasi dan konsolidasi masyarakat sipil di Indonesia, tidak terkecuali INFID.

MP3EI diluncurkan oleh Preside Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Mei 2011. Masterplan mencakup 22 aktivitas ekonomi utama Indonesia, terdiri atas 17 proyek di enam koridor yaitu koridor Sumatera, Koridor Kalimantan, Koridor Jawa, Koridor Sulawesi, Koridor Bali dan Nusatenggara, dan Koridor Papua. Keenam koridor akan dihubungkan dengan pembangunan infrastruktur. Keberadaan MP3EI mendapat sorotan tajam dari masyarakat sipil baik di daerah maupun di nasional. Kritik masyarakat sipil berpusat pada dua hal yaitu 1) metode penyusunan dokumen di luar jalur perencanaan pembangunan yang semestinya yaitu Musrenbang. MP3EI disusun hanya oleh pemerintah dan pelaku bisnis tanpa ada konsultasi dengan masyarakat sipil dan parlemen. Padahal dokumen ini digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pembangunan. 2) dampak yang ditimbulkan MP3EI terutama terhadap kerusakan lingkungan dan penduduk miskin. Sebagian besar proyek yang diusung MP3EI adalah proyek-proyek eksploratif berbasis sumber daya alam seperti minyak, gas dan mineral. Bukan pada pembangunan sentra-sentra ekonomi yang berkelanjutan dan menjawab masalah penduduk miskin. Masyarakat sipil melihat MP3EI dapat mengancam kelestarian lingkungan dan meninggalkan masalah kemiskinan dan juga ketimpangan. Tanpa mengindahkan kritik masyarakat sipil, pemerintah tetap menjadikan MP3EI sebagai acuan dalam pembangunan nasional. Dalam berbagai forum internasional, pemerintah menggunakan MP3EI untuk menarik investor pada proyek-proyek yang ada di dokumen tersebut.

Pada tahun yang sama tepatnya tanggal 28 Oktober 2011, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengesahan ini memiliki makna yang besar bagi masyarakat, setelah bertahun-tahun masyarakat menyuarakan pentingnya payung hukum yang memberi kepastian jaminan sosial. Meskipun UU baru dilaksanakan paling lambat Juli 2015, namun dengan adanya UU ini setidaknya telah ada jaminan hukumnya. Sampai saat ini pemerintah telah memiliki beberapa skema jaminan sosial seperti jaminan kesehatan untuk orang miskin, jaminan persalinan, conditional cash transfer yaitu untuk keluarga miskin yang memiliki anak balita sampai usia sekolah dasar dengan syarat harus menyekolahkan anaknya. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali orang miskin tidak mendapatkannya karena informasi yang terbatas. Hanya kalangan tertentu yang mengetahui program tersebut dan kalangan tertentu tersebutlah yang memanfaatkan program-program tersebut. Sementara dengan adanya UU ini diharapkan semua orang miskin dapat menerima manfaat dari program-program sosial melalui Badan Hukum yang disingkat dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Ruang lingkup BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, BPJS

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sementara BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, ada beberapa kajian mengenai proses demokrasi. Ada yang menyatakan Indonesia masih mengalami transisi demokrasi. Ada juga yang menyatakan demokrasi telah dibajak oleh oligarki-oligarki baru dengan tujuan untuk memperkaya diri dan kelompoknya saja. Sehingga demokrasi masih membutuhkan desakan kuat dari gerakan sosial untuk mendorong demokrasi ke arah yang lebih substantif. Desentralisasi sebagai buah dari demokrasi telah dimanfaatkan oligarki-oligariki di daerah. Hal ini bisa dilihat dari tingginya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik baik di daerah maupun di nasional. Hampir sebagian besar pemberitaan media kerap diwarnai berita penangkapan pejabat yang korup. Disisi lain, demokrasi juga menjadi pedang bermata dua bagi kebebasan beragama dan kebebasan mengelola sumber daya alam di Indonesia. Sebagian kelompok memanfaatkan demokrasi untuk menghancurkan kelompok lain, bahkan dengan cara kekerasan.

Pada tanggal 6 Februari 2011, sejumlah kelompok menyerang warga Ahmadiyah. Tiga orang dilaporkan meninggal dan jumlah rumah milik Ahmadiyah hancur dirusak massa. Peristiwa perusakan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa bulan sedahnya tepatnya 4 April 2011 kembali sejumlah kelompok menyerang Jamaah Ahmadiyah. Pristiwa ini terus berulang, bahkan terhadap kelompok lain yang dianggap menghina kelompok tertentu. Peristiwa ini sungguh meresahkan, di tengah gaung demokrasi yang dibanggakan. Satu sisi, angka korupsi tidak jua menurun. Sementara kekerasan antar warga tidak juga teratasi. Di tempat lain, konflik karena perebutan sumber daya alam juga meningkat. Pada Bulan Desember terjadi peristiwa penembakan aparat kepada warga di Bima, Nusa Tenggara Barat akibat penolakan warga terhadap perpanjangan ijin tambang di areal mereka. Peristiwa ini juga menimbulkan korban dari sisi warga.

## **2.2. Analisa Situasi Internasional**

Empat peristiwa internasional turut mempengaruhi dinamika advokasi INFID, yaitu keketuaan Indonesia di ASEAN, pertemuan puncak G20 yang berlangsung di Canes, Perancis; 4th high level meeting on development effectiveness di Busan, Korea Selatan; dan Arab Spring yang bermula dari Tunisia.

Tahun 2011, Indonesia menjadi ketua ASEAN. Selama menjabat sebagai Ketua, Indonesia mendorong menguatnya isu-isu substantif dan memperluas public outreach. Isu substantif yang didorong adalah memastikan adanya kemajuan yang signifikan dalam pencapaian komunitas ASEAN, terpeliharanya tatanan dan situasi di kawasan yang kondusif bagi upaya pencapaian pembangunan, dan bergulirnya visi "ASEAN pasca 2015" yang ditandai peran masyarakat ASEAN dalam masyarakat dunia. Prioritas tersebut didasarkan pada tiga Pilar ASEAN yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial-budaya. Pembahasan isu substatif dilakukan di berbagai level mulai dari level kementerian sampai pertemuan Kepala Pemerintahan. Pada pertemuan puncak yang berlangsung di Bali yang berlangsung pada bulan November menghasilkan Bali Declaration in a Global Community of Nations-Bali Concord III. Deklarasi bertujuan mempercepat integrasi ASEAN di 2015. Pada hajatan ASEAN ini, masyarakat sipil memberi catatan kritis atas upaya ASEAN untuk memperluas kerjasama dengan kawasan timur lainnya seperti ASEAN+3 ketika masalah-masalah di dalam ASEAN belum teratasi. Seperti komitmen bersama terhadap keamanan dan stabilitas di dalam kawasan karena hingga saat ini konflik antar negara ASEAN dan juga anggota Asean dengan China belum sanggup diatasi oleh

ASEAN sendiri. Sehingga masyarakat sipil mendorong penguatan ASEAN termasuk juga penguatan komunitas melalui kerjasama ekonomi dan sosia budaya yang semakin erat.

Krisis yang terjadi di AS dan Eropa turut mewarnai agenda 4th High Level Meeting on Development Effectiveness. Pengaruh ini terasa pada desakan kuat dari negara-negara maju untuk mendorong negara miskin dan berkembang meningkatkan pendanaan pembangunan dari dalam negeri melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan South-south Cooperation. Konsekuensi dari desakan tersebut, sektor swasta harus diakui sebagai salah satu aktor pembangunan selain pemerintah, donor dan masyarakat sipil. Kewajiban dan hak yang sama juga harus diberikan ke swasta, seperti penyediaan lingkungan yang mendukung dan akuntabilitas swasta. Sumber pendanaan lainnya adalah melalui South-South Cooperation. Negara-negara selatan yang tumbuh sebagai Emerging Country, harus turut membantu pembangunan di negara yang masih miskin dan tertinggal. Perubahan ini menjadikan arsitektur keuangan global berubah. Jika sebelumnya hubungan negara berdasarkan bantuan luar negeri adalah donor dan recipient, namun sekarang selain donor dan recipient juga muncul donor sekaligus recipient. Contohnya Indonesia, Brazil dan India, tiga negara dengan perekonomian yang cukup besar tumbuh menjadi donor tapi sekaligus sebagai recipient karena masih menghadapi masalah pembangunan. Pada awalnya China menolak mekanisme tersebut, namun ketika kerjasama Selatan-Selatan hanya bersifat sukarela, China setuju untuk menandatangani kesepakatan Busan. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, isu bantuan tidak lagi di bawah OECD-DAC, tetapi di bawah struktur baru yaitu Global partnership for Effective Development yang terdiri atas semua aktor pembangunan, termasuk masyarakat sipil.

Krisis pula yang menjadi alasan utama para pemimpin negara dan pemerintahan G20 berkumpul. Tahun 2011, tuan rumah G20 adalah Presiden Perancis. Sebagai tuan rumah, Perancis aktif mengusulkan agenda keuangan dan pembangunan. Eropa termasuk Perancis sejak awal menghendaki pengaturan sektor keuangan dengan mereformasi Financial Stability Forum (FSB). G20 juga memberi perhatian terhadap tax havens dengan mengeluarkan the Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Aturan ini diharapkan memberi tekanan terhadap negara-negara yang selama ini menjadi tempat para pengemplang pajak berlindung. Sementara masyarakat sipil di Indonesia memberi perhatian terhadap agenda pembangunan terutama di infrastruktur dan pangan. Untuk infrastruktur, pemerintah Indonesia secara terang-terangan menawarkan MP3EI. Padahal masyarakat sipil menolak dokumen tersebut sebagai dokumen pembangunan di Indonesia.

Selain peristiwa-peristiwa di kawasan ASEAN, transisi politik yang terjadi di Tunisia dan Mesir juga dibahas dalam forum-forum masyarakat sipil di Indonesia. Menarik karena transisi politik terjadi ketika dunia sedang mengalami krisis ekonomi. Sementara sejarah membuktikan, ketika krisis terjadi, perang tak terelakkan karena menghidupkan kembali bisnis persenjataan. Namun di sisi lain, pengalaman di Tunisia dan Mesir juga pernah terjadi di Indonesia. Transisi kemudian membawa perubahan aras politik dari otoritarian menjadi demokrasi. Transisi kemudian menjadi harapan baru bagi tatanan politik yang lebih berpihak terhadap rakyat. Pelajaran dari Indonesia, ketika masyarakat sipil yang menyuarakan kepentingan rakyat tidak sungguh-sungguh mengawal. Maka transisi politik akan dibajak oligarki-oligarki baru yang mengatasnamakan demokrasi.

### **2.3. Analisa Situasi Internal**

Terdapat beberapa peristiwa yang mempengaruhi kinerja INFID di tahun 2011, antara lain:

- a. Perubahan arsitektur pendanaan untuk pembangunan global memberi implikasi yang tidak sedikit bagi masyarakat sipil, khususnya INFID. Implikasi positifnya adalah dengan diakuinya sebagai aktor pembangunan, INFID dituntut untuk memperjelas arah advokasi dengan basis argumentasi yang terarah. Kecenderungan ini kemudian mendorong INFID mengadakan pelatihan-pelatihan penelitian di tahun sebelumnya dan menggunakan hasil penelitian untuk basis argumentasi baik nasional maupun internasional. Implikasi lainnya adalah menurunnya pendanaan bagi masyarakat sipil, terutama yang bersumber dari donor. Pendanaan untuk masyarakat sipil yang bersumber dari bilateral banyak melalui lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia. Sementara INFID berdasarkan mandat anggota, tidak boleh mengakses dana dari lembaga multilateral terutama Bank Dunia dan ADB.
- b. Tahun 2011 jugabukan tahun yang mudah bagi INFID. Setelah mundurnya Deputy Director INFID menjadi Seketraris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), tugas kelembagaan di dalam diserahkan ke program manager INFID. Beban pekerjaan menjadi bertumpuk karena Program Manager selain mengatur program juga mengurus kesekretariatan termasuk pelaporan. Hal inilah yang mengakibatkan beberapa tugas kelembagaan terhambat, termasuk dalam penyusunan pelaporan.

### BAB III

#### CAPAIAN PROGRAM INFID

Dalam perjalanannya selama satu tahun, ada beberapa keberhasilan advokasi yang dilakukan INFID, meliputi:

1. Menguatnya komitmen pemerintah ditingkat nasional maupun komitmen internasional terhadap pembangunan yang berpusat pada rakyat terutama untuk pemberantasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.
  - a. Ditingkat nasional, pemerintah terus memperbaiki program-program penanggulangan kemiskinan, penambahan anggaran dan penataan kelembagaan (meskipun INFID masih harus terus mengadvokasikan program-program penanggulangan kemiskinan karena kebijakan yang ada belum sepenuhnya berpihak terhadap orang miskin). Sampai saat ini pemerintah memiliki empat kluster program penanggulangan kemiskinan, terdiri atas kluster satu yang menysasar kemiskinan di rumah tangga, kluster dua untuk kemiskinan di komunitas, kluster tiga untuk bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro, dan kluster empat untuk pengadaan infrastruktur seperti rumah murah. Dari sisi anggaran juga terus mengalami kenaikan seperti tabel di bawah ini.



Sumber: TNP2K, 2012

- b. Pada level internasional, terutama di dalam Organisation for Economic Co-Operation and Development – Development Assistance Committee (OECD-DAC) mengenai pembiayaan untuk pembangunan yang bersumber dari bantuan luar negeri, terjadi pergeseran dari sebelumnya menitikberatkan pada aid effectiveness menjadi development Effectiveness. Pergeseran ini menandakan bantuan luar negeri diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi tujuan pembangunan terutama di penanggulangan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Terciptanya mekanisme dialog antara pengambil kebijakan terutama di kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan masyarakat sipil (baik INFID maupun jaringan INFID) mengenai pembangunan. Indikator dari keberhasilan ini ditandai dengan masyarakat sipil diundang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) sejak 2011 dan



terlibat dalam pembahasan evaluasi hasil perencanaan setiap enam bulan sekali dan disusunnya Pedoman Umum Pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Proses Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Nasional. Capaian ini menunjukkan menguatnya konsolidasi aktor-aktor pembangunan meliputi pemerintah, masyarakat sipil, dan donor terutama di nasional untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang berpihak terhadap rakyat. Hasil ini merupakan upaya INFID beserta jaringan untuk terus mendorong dibukanya ruang dialog yang konstruktif antar masyarakat sipil dengan pemerintah melalui advokasi-advokasi yang dilakukan.

3. Menguatnya posisi advokasi INFID di nasional dan internasional, dimana INFID menjadi mitra utama Kementerian Perencanaan Pembangunan untuk kerjasama pembangunan global. Hal ini ditandai dengan keberadaan INFID menjadi mitra utama kementerian Bappenas dan Aid for Development Effectiveness Secretariat (A4DES). Pada tingkat internasional, INFID menjadi sebagai salah satu anggota Steering Committee untuk evaluasi pelaksanaan Deklarasi Paris dan Agenda Accra untuk aksi di Indonesia bersama Deputi Kepala Bappenas, Perwakilan Asian Development Bank (ADB), dan perwakilan JICA. INFID juga menjadi anggota steering committee untuk the Capacity Development for Development Effectiveness (CDDE), dan anggota steering committee untuk Civil 20 (sebuah forum masyarakat sipil dari negara-negara anggota G20).
4. Menguatnya konsolidasi masyarakat sipil. Konsolidasi tersebut ditunjang basis argumentasi dari penelitian yang dilakukan bersama oleh INFID bersama jaringan. Seiring dengan itu, staff INFID mengalami peningkatan kapasitas sebagai peneliti dan memiliki kemampuan dalam presentasi di berbagai forum baik nasional maupun internasional. Indikator capaian bisa dilihat dari kualitas hasil penelitian yang dilakukan oleh staff INFID bersama jaringan INFID. Anggota dan jaringan INFID memiliki jaringan yang lebih luas dari partisipasinya di forum-forum nasional dan internasional.
5. Kampanye pengurangan utang untuk pencapaian MDGs terus mendapat sambutan baik, terutama dari kalangan pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan donor bilateral yaitu Pemerintah Italia. Hasil ini juga diperoleh dari kerja advokasi di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya INFID aktif menggelar pertemuan dengan BPK untuk mendorong dilakukannya audit utang luar negeri. Kegiatan yang sama terus dilakukan melalui kunjungan BPK ke INFID di tahun 2011. Indikator keberhasilan advokasi INFID ke BPK adalah dilakukannya audit BPK terhadap utang luar Negeri. Terbaru, BPK bukan saja melihat utang luar negeri dari sisi administratif tetapi sudah pada kinerjanya terhadap masyarakat. Pemerintah Italia juga datang ke INFID untuk minta masukan dari INFID mengenai rencana debt swap dari Italia.

Dari capaian-capaian tersebut, terdapat juga target yang belum mencapai hasil yang diharapkan. Program ini adalah program yang dirumuskan di tahun 2011 namun masih perlu diperkuat lagi untuk kerja-kerja dimasa datang, antara lain:

1. Pembangunan peer group di daerah melalui Badan Pengkajian Pembangunan Ekonomi Rakyat (BAPPERA) , terdiri atas masyarakat sipil, akademisi, pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kelompok inti diharapkan merumuskan konsep pembangunan kerakyatan di masing-masing daerah. Upaya ini belum memberikan hasil yang maksimal, meskipun telah dilakukan beberapa pertemuan di daerah yaitu di Bogor dan di Malang. Hambatan utamanya adalah minimnya ruang dan dana untuk melakukan konsolidasi di daerah yang digerakkan oleh INFID. Sementara untuk mendorong kerja di daerah yang sifatnya sukarela belum bisa dilakukan. Berbeda dengan yang terjadi di nasional, pembangunan kelompok inti terus dilakukan dengan kondolidasi intensif dalam menggodok isu-isu kerakyatan.

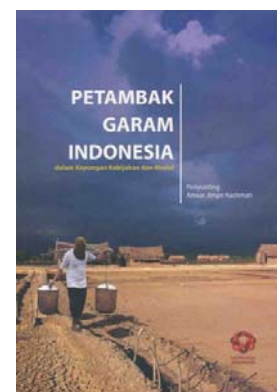
2. Advokasi terhadap isu pajak. Meskipun INFID tergabung di jaringan internasional untuk kampanye Financial Transaction Tax (FTT), namun di nasional gerakan tersebut belum mendapat sambutan baik dari pemerintah. Secara informal INFID telah mengajukan usulan ke pemerintah Indonesia terutama ke Kementerian Keuangan untuk mengatur transaksi keuangan melalui pajak, namun usulan tersebut belum mendapat tanggapan. Dari sisi nasional, gerakan pajak lebih banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil lainnya.

## BAB IV

### Kegiatan yang diselenggarakan

#### 5.1. Melakukan penelitian dan publikasi mengenai Foreign Direct Investment, ekonomi kerakyatan, community resilience untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, pencapaian MDGs selama 10 tahun di Indonesia dan implementasi Deklarasi Paris di Indonesia.

- a. Penelitian mengenai Tanggung Jawab Sosial PT INCO bagi Pertumbuhan Ekonomi Rakyat, Sosial dan Lingkungan di Sulawesi Tengah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Desember 2011. Tujuan umum penelitian adalah 1) Mengkaji peranan perusahaan, dalam hal ini PT International Nickel Indonesia, bagi perekonomian Indonesia sesuai dengan panduan OECD; 2) Mengkaji peranan Penanaman Modal PT INCO bagi pengembangan kapasitas ekonomi rakyat terutama kontribusi PT INCO bagi kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di Sulawesi Tengah. *Penelitian sudah selesai dilaksanakan, sementara publikasi dan dvokasi belum diselenggarakan.*
- b. Studi Ekonomi Kerakyatan dengan judul penelitian Ketangguhan Rakyat dalam Membangun Perekonomiannya, dilaksanakan pada September – Desember 2011. Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten Kota yaitu di Malang, Jawa Timur dan di Kota Makassar. Penelitian mengambil dua lokasi yang berbeda yaitu Malang untuk ekonomi berbasis pertanian yang digerakkan oleh petani dan perempuan, sementara di Makassar adalah SMEs. Tujuan umum penelitian adalah memperkuat pelaku-pelaku ekonomi rakyat dalam sistem ekonomi Indonesia. Tujuan khusus penelitian adalah 1) mendokumentasikan model dan sistem ekonomi rakyat yang dikembangkan oleh komunitas lokal, 2) mengidentifikasi tantangan dan hambatan baik berupa kebijakan maupun selama proses produksi dalam mempromosikan dan mengembangkan ekonomi rakyat, 3) mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh model pertumbuhan ekonomi terhadap pengembangan ekonomi rakyat, 4) menetapkan potensi ekonomi rakyat dalam mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. *Advokasi sudah dilaksanakan dalam bentuk dialog dengan Bappenas dalam rangka perencanaan pembangunan nasional dan mengikuti debat-debat mengenai financial inclusion. Meskipun penelitian baru selesai di akhir tahun 2011, namun temuan awal penelitian telah digunakan sebagai basis argumentasi dalam advokasi nasional dan internasional terutama untuk ASEAN, Development Effectiveness, dan G20.*
- c. Penelitian dengan tema community-based measures towards mitigation and adaptation to climate change dengan tema Pangan dan Perubahan Iklim. Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten yaitu di Tampobulu, Sulawesi Selatan dan di Malang, Jawa Timur. Hasil penelitian memberikan gambaran ketangguhan petani dalam menyediakan pangan melalui irigasi dan metode pertanian, juga perjuangan petani dalam mendapatkan lahan atas penguasaan lahan oleh PT Perhutani. *Penelitian digunakan untuk advokasi INFID di development effectiveness dan G20.*
- d. Penelitian mengenai kebijakan garam di Indonesia beserta dampaknya bagi petani garam. Penelitian dilakukan oleh jaringan INFID dan sudah dipublikasi dalam bentuk buku. *Penelitian juga sudah diadvokasikan di tingkat nasional.*
- e. Menyusun Citizen Report for MDGs. Laporan ini disusun bersama INFID dan jaringan INFID terhadap semua goals. Penyusunan laporan selain bertujuan mendorong pencapaian MDGs, juga



memperkuat konsolidasi antar masyarakat sipil. *Meskipun buku hasil penelitian baru akan diluncurkan di tahun 2012, tetapi data penelitian telah digunakan dalam konsultasi untuk agenda pembangunan paska 2015. Hasil kajian juga menjadi materi untuk mengawal pelaksanaan Peta Jalan Nasional Pencapaian MDGs.*

## **5.2. Advokasi terhadap program penanggulangan kemiskinan – PNPM Mandiri dan pembangunan yang inklusif**

- a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan. PNPM pertama kali diluncurkan tahun 2007 oleh Preside Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat sipil terutama INFID memiliki perhatian yang serius terhadap PNPM Mandiri karena program berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat miskin. Selain itu, sumber pendanaan PNPM Mandiri sebagian berasal dari pinjaman Bank Dunia. Melekat di dalamnya prinsip-prinsip Deklarasi Paris yang juga menjadi salah satu fokus advokasi INFID. Melanjutkan advokasi yang sudah dimulai sejak 2010 dengan penelitian di tiga propinsi yaitu Sumatera Utara, NTT dan NTB, advokasi INFID di 2011 fokus pada konsolidasi anggota dan jaringan. Kegiatan yang diselenggarakan meliputi:
  - Workshop Harmonisasi Temuan dan Rekomendasi Studi-Studi PNPM Mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2011 bersama-sama GAPRI, Konsepsi NTB, FIK Ornop, dan IRE. Organisasi tersebut adalah organisasi yang sama-sama melakukan studi terhadap PNPM Mandiri.
  - Workshop mengenai Pembiayaan PNPM Mandiri pada tanggal 1 November 2011 dengan peserta yang sama ditambah beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya yaitu JARI dan PKM ACE
- b. Terlibat dalam diskursus di regional mengenai pembangunan berkelanjutan dengan menghadiri Regional Conference mengenai Development Models dengan tema Promoting a Transformative Agenda for Sustainable Development pada tanggal 15–16 Agustus 2011 di Bangkok, Thailand. Konferensi diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan agenda masyarakat sipil untuk kawasan Asia terhadap Rio+20
- c. INFID juga memberi catatan Pidato Presiden RI mengenai nota keuangan untuk tahun 2012. INFID memberi catatan mengenai sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan hadirnya dokumen MP3EI, bertambahnya utang luar negeri, dan kualitas program penanggulangan kemiskinan yang masih bersifat karikatif.

## **5.3. Advokasi melalui development effectiveness dengan kegiatan sebagai berikut**

Advokasi di development effectiveness mengarah pada dua hal yaitu 1) memperkuat pilar democratic ownership dengan mendorong pemerintah memperkuat country system terutama untuk pengelolaan bantuan dan penguatan perencanaan pembangunan nasional; 2) mendorong diakuiinya masyarakat sipil dalam berbagai forum nasional dan internasional.

- a. Advokasi dilakukan dengan menyelenggarakan dialog baik formal maupun informal dengan aktor-aktor pembangunan seperti donor, pemerintah dan masyarakat sipil. Ada dialog dalam bentuk informal seperti audiensi ke kementerian terkait, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan aktor pembangunan yang lain atau menyelenggarakan kegiatan sendiri berupa workshop atau semiar. Kegiatan yang diselenggarakan INFID sendiri seperti:
  - Bekerja sama dengan Asia Pacific Research Network (APRN) yang berbasis di Manila, Philipina menyelenggarakan the 3rd Open Forum Asian Regional Synthesis Workshop on Development Effectiveness pada tanggal 3 – 4 Mei 2011 di Jakarta. Kegiatan dihadiri oleh masyarakat sipil dari beberapa negara di Asia Pasifik termasuk dari Indonesia, donor dan pemerintah Indonesia.

- Bekerja sama Aid for Development Effectiveness Secretariat (A4DES) menyelenggarakan workshop nasional pada tanggal 8 – 9 Juni 2011, sebagai persiapan masyarakat sipil menuju 4th High Level Meeting on Development Effectiveness yang berlangsung di Busan, Korea Selatan. Selain membahas agenda menuju Busan, juga dibahas kemajuan mekanisme akuntabilitas di dalam masyarakat sipil dan sosialisasi Istanbul Principle.

b. Menghadiri pertemuan-pertemuan internasional antara lain:

- Menghadiri 4th High Level Meeting on Development Effectiveness di Busan pada tanggal 29 November – 2 Desember 2011. Dari Indonesia hadir empat orang utusan masyarakat sipil yaitu dua orang dari INFID (satu orang mendapat dukungan dari pemerintah sebagai delegasi pemerintah, satu orang mendapat dukungan dari Better Aid), satu anggota INFID yaitu Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan satu jaringan INFID yaitu YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kemanusiaan). Delegasi masyarakat sipil membawa mandat dari anggota untuk memperkuat enabling environment bagi masyarakat sipil dan memperkuat country ownership melalui mekanisme perencanaan pembangunan nasional. Pada kesempatan ini, INFID mempublikasikan buku Can Indonesia Exit from Aid?
- Menghadiri Asia Pacific Climate Change Finance and Development Effectiveness Dialogue pada 12 – 13 September 2011 di Bangkok. Pertemuan diselenggarakan oleh the Capacity Development for Development Effectiveness di mana INFID duduk sebagai salah satu anggota Steering Committee difasilitasi oleh UNDP. Dialog bertujuan untuk melihat kemajuan pembiayaan ODA di Climate Change dan sekaligus mengatur scaled-up pembiayaan perubahan iklim di masa mendatang.
- Menghadiri international workshop and public conference dengan tema 2011 Seoul Civil Forum on Aid and Development Effectiveness pada 30 Agustus sampai 3 September 2011. Konferensi diselenggarakan sebagai upaya konsolidasi masyarakat sipil global untuk menyambut pertemuan puncak High Level Meeting on Development Effectiveness yang berlangsung bulan Desember 2012.
- Menghadiri 2nd Global Assembly of the Open Forum for CSO Development Effectiveness di Siem Reap, Cambodia pada 28 sampai 30 Juni 2011. Bertujuan untuk merumuskan International Framework for CSO Development Effectiveness. Framework terdiri atas guidelines, mechanisms, indicators termasuk juga rekomendasi untuk enabling environment.



**5.4. Advokasi melalui lembaga multilateral seperti ASEAN, G20 dan PBB dengan kegiatan sebagai berikut:**

Terdapat dua lembaga multilateral yang mendapat perhatian besar di tahun 2011 yaitu ASEAN dan G20. Pada tahun 2011, Indonesia duduk sebagai ketua ASEAN. Untuk ASEAN karena sudah ada mekanisme dialog masyarakat sipil dengan pemimpin ASEAN, maka fokus advokasi INFID pada kebijakan-kebijakan ASEAN terutama di bidang ekonomi dan politik yang merugikan. Sementara sebagai anggota G20, pemerintah cukup aktif baik dalam mengusulkan agenda maupun mengimplementasikan kesepakatan yang dibuat di G20. Berkaitan dengan hal tersebut, INFID dalam advokasinya memiliki dua agenda yaitu 1) memastikan agenda pembangunan untuk kepentingan rakyat (people-centered development) dengan fokus pada isu pangan, inklusi keuangan, rural infrastruktur khususnya air, dan pendanaan untuk pembangunan; 2)

mendorong mekanisme yang inklusif di tingkat nasional dan internasional dengan melibatkan masyarakat sipil. Posisi tersebut disuarakan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Bersama dengan digelar ASEAN Summit pada tanggal 7-8 Mei 2011 di Jakarta, INFID menyelenggarakan rangkaian kegiatan yaitu:
  - Bersama jaringan dan anggota mengadakan ASEAN People Forum dengan tuntutan utama pada kerjasama ASEAN yang lebih berpihak terhadap masyarakat ASEAN. Rangkaian kegiatan yang diselenggarakan meliputi menggelar diskusi dan aksi bersama.
  - Mengadakan diskusi terbatas mengenai Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam penyelesaian konflik perbatasan Thailand-Kamboja dan Pelambanan Proses Demokratisasi di Burma
  - Mengajukan gugatan mengenai ASEAN Charter ke Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini gugatan belum diputus oleh MK
- b. Menyelenggarakan pertemuan berupa round-table discussion, workshop dan konferensi pers bersama dengan anggota dan jaringan masyarakat sipil. Kegiatan meliputi:
  - Menyelenggarakan Round-table Discussion dan Workshop bertema “Membangun Ownership Indonesia di G20: Penguatan Pangan yang Berkelanjutan?” pada 28-29 Maret 2011. Kegiatan menghadirkan pembicara Bapak Mahendra Siregar (Pada saat itu duduk sebagai Wakil Menteri Perdagangan sekaligus Sherpa Indonesia di G20). Round-Table Discussion bertujuan mendalami proposal Indonesia khusus di pangan di G20. Dilanjutkan dengan workshop yaitu mengidentifikasi masalah sekaligus rekomendasi kepada pemerintah untuk dibawa ke forum G20.
  - Merespond G20 Summit yang berlangsung di Canes, Perancis, INFID bersama dengan anggota dan jaringan menyelenggarakan konferensi pers pada 3-4 November 2011. Konferensi pers dimuat di Koran Kompas dan Koran Jakarta.
- c. Menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke 16 yang berlangsung dari tanggal 28 Februari sampai 25 Maret 2011. Anggota INFID diwakili oleh Imparsial mengirimkan statement tertulis mengenai Pegiat Hak Asasi Manusia di Indonesia tahun 2010.

## **5.5. Capacity Development**

- a. Pada aspek kelembagaan:
  - Memperkuat keorganisasian dengan aktifnya INFID di dalam International Forum for National NGO Platform (IFP). Berkaitan dengan keanggotaan INFID di IFP, beberapa advokasi internasional dilakukan bersama yaitu development effectiveness (selain bergabung dengan Better Aid, INFID juga bergabung dengan Open Forum for Development Effectiveness). INFID juga menghadiri pertemuan internasional yang diselenggarakan IFP yaitu Asian Regional Meeting di Nepal pada bulan Oktober 2011, 2nd General Assembly of CONCORD in Brussel on 21th to 22nd October 2011, dan 1th General Assembly of IFP in Dakar on 2nd to 10th February 2011 (bersamaan dengan World Social Summit yang berlangsung di tempat yang sama).
  - Menghadiri Global Governance and Transnational Issue Linkages: Advocay, Partnership and Global Alliance yang diselenggarakan di Taiwan, China pada tanggal 23 September 2011. Konferensi bertujuan untuk meningkatkan kerjasama global terutama dikalangan masyarakat sipil terutama di Asia, termasuk mengidentifikasi kebutuhan capacity building bagi masyarakat sipil dalam tata dunia yang sedang berubah.
  - Mengadakan konsolidasi para ahli melalui BAPPERA. Telah diadakan tiga kali pertemuan yaitu di Bogor, di Malang dan di Jakarta. Untuk di Bogor dan Malang, lebih pada ahli dari universitas. Sementara di Jakarta, konsolidasi BAPPERA dilakukan bersamaan dengan diskusi mengenai PNPM Mandiri.
  - Di kalangan masyarakat sipil sendiri, INFID aktif mengadakan diskusi mengenai masa depan masyarakat sipil di Indonesia. Mengidentifikasi tantangan sekaligus kebutuhan untuk terus memajukan diri. Selain pertemuan intensif yang diselenggarakan INFID

dengan anggota dan jaringan, INFID juga menyelenggarakan satu kali diskusi mengenai pentingnya masyarakat sipil berinovasi kalau tidak ingin digerus krisis.

- b. Pada aspek personal baik di sekretariat, anggota maupun jaringan, pengembangan kapasitas yang sudah dilaksanakan yaitu:
  - Melalui penelitian bersama, terutama dengan peserta training penelitian yang diselenggarakan INFID di tahun sebelumnya. Seperti penelitian Ketangguhan Ekonomi Rakyat dalam Membangun Perekonomiannya dilaksanakan bersama staff sekretariat INFID dengan salah seorang peserta training penelitian. Demikian halnya dengan penelitian Tanggung Jawab Sosial PT INCO dilakukan oleh salah satu peserta pelatihan penelitian yang diselenggarakan INFID. Penelitian PNPM Mandiri juga dilakukan lulusan pelatihan penelitian INFID.
  - Melibatkan staff, anggota dan jaringan INFID dalam pertemuan internasional. Seperti hadirnya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai anggota INFID dan YAKKUM sebagai jaringan INFID dalam High Level Meeting on Development Effectiveness di Busan, dan kehadiran staff sekretariat di pertemuan internasional mengenai National NGO Platform
  - Mengirim staff sekretariat untuk mengikuti pelatihan mengenai Women Policy Capacity Development di Seoul, Korea Selatan. Secara reguler INFID menyebarkan informasi mengenai capacity yang diselenggarakan organisasi lain ke anggota dan jaringan INFID.

#### **5.6. Kegiatan sebagai respond atas situasi nasional dan internasional**

Lima haldi atas merupakan kegiatan yang telah menjadi kerangka kerja INFID. Sementara bagian ini adalah kegiatan sebagai bentuk respond atas situasi nasional dan internasional. Respond yang dilakukan berupa memberi input secara substantif di pertemuan yang diselenggarakan organisasi lain atau INFID mengeluarkan statemen berkaitan dengan salah satu peristiwa tersebut. Kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Respond terhadap peristiwa nasional:
  - Mengeluarkan statement menyikapi pembiaran negara terhadap kekerasan yang dialami warga Ahmadiyah Indonesia: Negara gagal dalam melindungi warga negara dalam beragama dan berkeyakinan. Selain itu INFID berkoordinasi dengan jaringan INFID untuk membawa peristiwa ini dalam Sidang Dewan HAM PBB sekaligus mendorong investigasi dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
  - Memberikan input terhadap kajian Asian Strategic mengenai MP3EI. The Asian Strategic merupakan lembaga konsultan yang melakukan kajian mengenai hambatan pelaksanaan MP3EI. Dalam kesempatan ini, INFID aktif memberi masukan. INFID bahkan ikut konsultasi yang diseleggarakan di koridor Kalimantan.
- b. Respond atas peristiwa internasional:
  - Menyelenggarakan diskusi dengan tema Dinamika Politik Mesir dalam Konstalasi Politik Kotemporer. Diskusi melakukan analisis atas peristiwa yang terjadi di Mesir.

## BAB V

### PEMBELAJARAN DAN KEBERLANJUTAN

#### 5.1 Pembelajaran

- a. Terlepas dari capaian-capaian program INFID, masih banyak ruang yang harus terus didorong oleh INFID. Seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan yang perlu terus ditingkatkan dari yang sifatnya karikatif ke penyelesaian yang lebih struktural. Komitmen di nasional dan internasional mengenai people-centered development perlu diperkuat dan dikawal untuk dipastikan bahwa implementasi kebijakan di internasional, nasional dan lokal mencerminkan kepentingan rakyat.
- b. Berubahnya arsitektur pendanaan pembangunan global dan berkembangnya Indonesia sebagai Emerging Country menjadi satu tantangan tersendiri bagi masyarakat sipil. Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi masalah ekonomi, sosial dan politik terkait dengan model pembangunan. Kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi masih menjadi wajah pembangunan Indonesia. Problem-problem tersebut harus terus disuarakan oleh masyarakat sipil. Namun dengan kesan internasional terhadap perubahan Indonesia, dukungan pendanaan terus menurun. Sementara masyarakat sipil belum bisa mengembangkan sumber pendanaan yang mandiri.
- c. Seiring dengan diakuinya masyarakat sipil sebagai aktor pembangunan, tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas advokasi masyarakat sipil. Kemampuan penelitian, dialog dengan aktor pembangunan yang lain, presentasi di forum-forum nasional dan internasional perlu diperkuat dan ditingkatkan. Pengakuan ini menjadi satu tantangan tersendiri bahwa masyarakat sipil layak duduk sejajar dengan aktor pembangunan lainnya.

#### 5.2 Keberlanjutan

Pada level nasional, INFID akan terus menyuarakan pentingnya pembangunan yang inklusif, yang menjawab masalah kemiskinan, ketimpangan dan diskriminasi. Program-program penanggulangan kemiskinan harus ditingkatkan kualitasnya dengan tidak hanya bersifat karikatif, melainkan menjawab masalah struktural. Demikian halnya dengan ketimpangan dan diskriminasi, harus diselesaikan dengan tata pembangunan yang lebih adil. Guna memperkuat advokasi, INFID akan mendorong pelibatan aktif anggota dan jaringan di mekanisme perencanaan pembangunan nasional. INFID akan terus memproduksi kajian-kajian berbasis riset berkualitas sebagai basis argumentasi. Pada level internasional, INFID akan terus mendorong dan memperkuat people-centered development dalam kerjasama pembangunan global melalui G20 maupun post 2015.

Guna menjawab tantangan dan kebutuhan ke depan, setidaknya ada tiga hal yang akan diperkuat INFID, yaitu 1) meningkatkan kapasitas kelembagaan INFID agar tetap menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mampu mendorong perubahan, 2) menjadikan analisis INFID sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan baik di nasional maupun internasional, 3) mengadakan konsolidasi dengan masyarakat sipil lainnya untuk menyiasati keterbatasan pendanaan.



## BAB VI

### LAMPIRAN

#### 1. Kegiatan yang diselenggarakan

##### Rapat Program INFID Selama Tahun 2011

No.	Tanggal	Rapat Program
1.	13 Januari 2011	Workshop Evaluasi dan Perencanaan Program Tahunan 2011
2.	14 Januari 2011	Workshop Evaluasi dan Perencanaan Program Tahunan 2011 (Lanjutan)
3.	20 Januari 2011	Rapat Board Executive
4.	21 Januari 2011	Rapat mengenai Shadow Report Development Effectiveness
5.	24 Februari 2011	Rapat mengenai Laporan Narrative 2010, Update Fundraising dan Program, dan Budget Gabungan Program 2011
6.	14 Maret 2011	Rapat mengenai Update Fundraising dan Perencanaan Agenda Kegiatan
7.	15 Maret 2011	Rapat Board Executive
8.	18 Maret 2011	Rapat dengan PACIVIS mengenai Riset Independensi Bank Indonesia
9.	23 Maret 2011	Rapat mengenai Pengajuan Proposal ke TIFA dan Persiapan Acara CSO Effectiveness & ASEAN
10.	24 Maret 2011	Rapat mengenai Persiapan Proposal ACTIVE ke EU
11.	25 Maret 2011	Rapat mengenai Persiapan Proposal EIDHR ke EU
12.	23 Mei 2011	Rapat Board Executive
13.	1 Juni 2011	Rapat mengenai pembuatan laporan naratif, pembuatan proposal untuk EIDHR, dan identifikasi funding
14.	22 Juli 2011	Rapat mengenai update proposal-proposal untuk tiap program, membahas proposal mengenai G20 yang akan diajukan ke Oxfam dan proposal NSALA ke EU
15.	12 September 2011	Rapat mengenai advokasi PNPM Mandiri
16.	19 Oktober 2011	Rapat mengenai strategi advokasi PNPM Mandiri
17.	20 Desember 2011	Rapat mengenai persiapan pelaksanaan proyek EIDHR di tahun 2012

##### Kegiatan INFID dalam Bentuk Diskusi atau Workshop Selama Tahun 2011

NO	Tanggal	Kegiatan
1.	18 Januari 2011	Pertemuan dengan Menko Perekonomian: Debt Swap Italia
2.	4 Februari 2011	Dinamika Politik Mesir dalam Konstalasi Politik Kontemporer Timur Tengah
3.	22 Maret 2011	Diskusi Terbatas: "Persiapan Indonesian People Summit"
4.	28-29 Maret 2011	Round-table Discussion dan Workshop "Membangun Ownership Indonesia di G20: Penguatan Pangan yang Berkelanjutan?"
5.	3-4 Mei 2011	The 3rd Open Forum Asian Regional Synthesis Workshop on Development Effectiveness
6.	6-7 Mei 2011	Menggelar serial diskusi mengenai ASEAN
7.	9-12 Mei 2011	Pertemuan BAPPERA di Malang

NO	Tanggal	Kegiatan
8.	13 Mei 2011	Diskusi terbatas: "Krisis NGO: Inovasi atau Mati"
9.	23 Mei 2011	Seminar "Kepemimpinan Indonesia Di ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja dan Pelambanan Proses Demokratisasi di Burma"
10.	8-9 Jui 2011	Workshop Nasional: "Peta Jalan Menuju Busan: Peran Masyarakat Sipil dalam Efektivitas Pembangunan"
11.	4 Oktober 2011	Workshop Harmonisasi Studi PNPM
12.	1 November 2011	Workshop Pembiayaan PNPM
13.	2 November 2011	Konferensi Pers merespon pertemuan G20 di Perancis tanggal 3-4 November 2011

### Statement yang dikeluarkan oleh INFID Selama Tahun 2011

No.	Judul Statement	Tanggal
1.	Statement INFID Menyikapi Pembiaran Negara terhadap Kekerasan yang dialami Warga Ahmadiyah Indonesia : Negara Gagal dalam Melindungi Warga Negara dalam Beragama dan Berkeyakinan	6 Februari 2011
2.	Statement Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi: Kehadiran Presiden SBY di Forum G20 akan Sia-sia jika hanya Menghasilkan Utang Baru dan Tidak Mampu Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia	2 November 2011

### 2. Pemberitaan INFID di Media Selama Tahun 2011

No.	Judul Berita	Media	Tanggal
1.	Serangan ke Ahmadiyah dibawa ke Dewan HAM PBB	Vivanews.com	7 Februari 2011
2.	INFID : Negara Gagal Melindungi Warga dalam Beribadah	Liputan6.com	8 Februari 2011
3.	Komnas HAM Investigasi Cikeusik 3 Bulan	Vivanews.com	8 Februari 2011
4.	Pemerintah Gagal Lindungi TKI	Kompas.com	28 Februari 2011
5.	Opini: Diplomasi Kompensasi	Kompas	4 April 2011
6.	Mengurai Kontroversi RUU Intelijen	Okezone.com	9 Mei 2011
7.	Buka Keran Praktik Jual-Beli Informasi 2014	Okezone.com	10 Mei 2011
8.	Opini: ASEAN Bukan Untuk Buruh Migran?	Kompas	10 Mei 2011
9.	INFID Jagokan Sri Mulyani	Warta Semesta Berita Online	25 Mei 2011
10.	Naik, Utang RI Capai Rp 1.804 Triliun	Kompas.com	16 Juni 2011
11.	MK Didesak Batalkan UU Ratifikasi Piagam ASEAN	Okezone.com	27 Juni 2011
12.	Opini: Siapa yang Memenangi	Kompas	9 Agustus 2011

No.	Judul Berita	Media	Tanggal
	Transisi?		
13.	Opini: Beberapa Catatan atas Pidato Presiden	Kontan	19 Agustus 2011
14.	Pemerintah harus Perhatikan Produktivitas Buruh	Okezone.com	10 September 2011
15.	Kemiskinan bisa Berujung Penggadaian Nasionalisme	Okezone.com	10 September 2011
16.	Operasi Yustisi Tak Efektif Atasi Urbanisasi	Vivanews.com	10 September 2011
17.	Operasi Yustisi Tak Mempan Atasi Urbanisasi	Kompas.com	10 September 2011
18.	Atasi Urbanisasi, Indonesia Patut Mencontoh Thailand	Kompas.com	10 September 2011
19.	TV Shows Draw Newcomers to City	The Jakarta Post	12 September 2011
20.	Korupsi Tantangan Pencapaian MDGs	SinarHarapan	20 September 2011
21.	Presiden SBY Didesak Urai Persoalan di Papua	Okezone.com	25 Oktober 2011
22.	Kehadiran Presiden di G20 Akan Sia-sia	Kompas.com	3 November 2011
23.	Peran RI Sia-sia Jika Cuma Tarik Utang Baru	Koran Jakarta	3 November 2011
24.	Opinion: Can Indonesia do Without Foreign Aid?	The Jakarta Post	1 Desember 2011

### 3. Foto Kegiatan

